

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan signifikan. Berdasarkan data proyeksi dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, total penduduk di Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 281,6 juta jiwa, dengan tren pertumbuhan yang terus mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun. Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia diproyeksikan memiliki populasi sekitar 41,71 juta jiwa, menduduki jumlah penduduk terbanyak di 38 provinsi nomor dua setelah Jawa Barat (Fadhlurrahman, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa Jawa Timur tetap menjadi wilayah dengan kontribusi signifikan terhadap total populasi nasional. Pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kelahiran, migrasi, dan perkembangan ekonomi. Meskipun laju pertumbuhan penduduk di Indonesia secara umum mulai melambat Jawa Timur masih mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi terutama di wilayah perkotaan seperti Surabaya, Malang, dan Kediri.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat menuntut pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan data kependudukan dalam ranah pelayanan publik. Pengelolaan ini menjadi sangat krusial karena data yang akurat dan terpadu berfungsi sebagai landasan utama dalam merencanakan pembangunan, mendistribusikan sumber daya, serta memenuhi hak-hak dasar

masyarakat. Seiring dengan bertambahnya populasi, pemerintah berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara terdaftar secara resmi agar dapat mengakses layanan publik secara layak. Sebagai langkah nyata, pemerintah telah berupaya membenahi administrasi kependudukan melalui berbagai program, salah satunya adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang bertujuan mengintegrasikan data secara nasional. Selain itu, kebijakan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi strategi penting untuk menjamin bahwa seluruh individu baik dewasa maupun anak-anak memiliki identitas resmi yang valid untuk mengakses berbagai pelayanan publik tersebut. Sebagai generasi penerus yang menentukan masa depan bangsa, anak-anak memiliki peran krusial dalam pembangunan dan keberlangsungan negara. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya segala kebutuhan dasar serta mendukung proses tumbuh kembang mereka. Mengingat posisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan anak sejak usia dini agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri dan bermartabat. Kehadiran pemerintah di sini sangat penting untuk memastikan anak-anak terlindungi dari berbagai ancaman kekerasan maupun tindakan diskriminatif. Namun, upaya perlindungan ini tidak dapat berjalan sendiri melainkan harus menjadi tanggung jawab kolektif yang melibatkan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, hingga orang tua. Dalam konteks tersebut, pemenuhan hak sipil anak merupakan salah satu hak

paling mendasar yang wajib diprioritaskan dan dipenuhi terlebih dahulu (Prabawati, 2016).

Kesejahteraan sosial memiliki peranan yang krusial, terutama untuk anak-anak. Aspek ini sangat penting agar hak-hak dasar mereka dapat dipenuhi, yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Dengan adanya kesejahteraan sosial yang cukup setiap anak berkesempatan untuk berkembang dengan baik, merasakan rasa aman, dan mengoptimalkan kemampuan mereka demi masa depan yang lebih cerah. Secara umum, konsep kesejahteraan sosial dapat dipahami melalui aspek kebahasaan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2008) menjelaskan istilah ini sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat yang aman, selamat, tenang, dan makmur. Sementara itu, dari sudut pandang hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 menegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan keadaan saat kebutuhan dasar masyarakat baik secara materi, spiritual, maupun sosial telah terwujud dengan baik. Ketika berbagai kebutuhan tersebut tercapai, masyarakat tidak hanya dapat hidup dengan layak tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka serta mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di lingkungan sekitar secara optimal. Menurut Suharto, 2005; Adi, 2012; Fahrudin, 2012 dalam (Setiawan, 2017:275). Kesejahteraan sosial didefinisikan dalam berbagai perspektif, yaitu:

- a. Kesejahteraan sosial sebagai sebuah aktivitas atau sistem yang terorganisasi
- b. Kesejahteraan sosial sebagai kondisi sejahtera

c. Kesejahteraan sosial sebagai disiplin ilmu

Konsep kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi yang lebih baik, kebahagiaan dan kesejahteraan yang terdiri dari tiga elemen yang sangat krusial yaitu:

“A condition of social welfare (or social well-being) is conceived of as comprising three elements. They are, first, the degree to which social problems are to managed. Second, the extent to which needs are met and finally, the degree to which opportunities for advancement a provided. These three elements apply to individuals, families, groups, communities and even whole societies. (Midgley, 1995)”

Menurut Midgley et.al. dalam (Setiawan 2017:276), kesejahteraan sosial pada dasarnya adalah sebuah kondisi saat manusia mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dan mapan. Keadaan ini dapat terwujud ketika kebutuhan mendasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan penghasilan sudah terpenuhi dengan baik, sehingga masyarakat bisa menjalani hidup dengan aman, puas, serta terhindar dari berbagai ancaman yang membahayakan jiwa. Dalam lingkup yang lebih luas, kesejahteraan sosial juga mencerminkan kemampuan dari setiap individu, keluarga, kelompok, hingga lembaga sosial dalam merespons kebutuhan hidup, menjalankan fungsi dan peran mereka di Masyarakat, sekaligus bertahan saat menghadapi berbagai guncangan atau tekanan ekonomi maupun sosial.

Menurut Walter A. Friedlander (1961) dalam Rahmat et al. (2020:103), kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem terorganisasi yang terdiri dari berbagai pelayanan dan lembaga sosial. Sistem ini bertujuan untuk membantu individu maupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang layak. Melalui sistem tersebut, masyarakat juga dibantu untuk membangun hubungan sosial yang baik, sehingga mereka mampu

mengembangkan potensi dirinya secara maksimal serta meningkatkan kualitas hidup yang selaras dengan kebutuhan keluarga dan lingkungannya.

Suharto 2009:153 dalam (Turang et al., 2021:5-6) menjelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah: "Kesejahteraan sosial adalah keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sudah terpenuhi sehingga mereka dapat hidup dengan layak serta berkembang, yang memungkinkan mereka menjalankan fungsi sosialnya".

Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini di masyarakat, baik yang bersifat materi, spiritual, maupun sosial, akan mendorong masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan mencapai fungsi sosial mereka. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Pekerjaan sosial melibatkan penyediaan layanan sosial agar individu dapat melaksanakan fungsi sosial mereka dalam komunitas seperti biasanya. Menurut Fahrudin 2012:10 dalam (Turang et al., 2021:6) Secara umum, kesejahteraan sosial bertujuan :

1. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur melalui pemenuhan berbagai kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, serta jalinan hubungan sosial yang harmonis dengan lingkungan sekitar.
2. Untuk membantu individu agar mampu beradaptasi secara baik dengan komunitas di sekitarnya. Kemampuan adaptasi ini dicapai melalui pemanfaatan dan pengembangan berbagai sumber daya yang ada, sehingga

masyarakat dapat terus meningkatkan kualitas hidup mereka ke arah yang lebih memuaskan.

Kesejahteraan sosial bagi anak merupakan elemen vital untuk memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi, termasuk pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mereka dianggap sebagai generasi penerus negara, sehingga negara bertanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan dan perkembangan anak-anak. Bagi seorang anak, kesejahteraan akan tercapai apabila kebutuhan mendasar mereka, seperti pemenuhan gizi, akses kesehatan, pendidikan yang layak, serta perlindungan dari berbagai ancaman, dapat terpenuhi secara optimal. Kondisi inilah yang membuka peluang bagi anak untuk tumbuh dengan sehat, merasa aman, serta mengembangkan potensi diri demi menyongsong masa depan yang lebih cerah. Dalam kaitannya pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan anak bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, melainkan sebuah kewajiban bersama yang harus dipikul oleh negara, pemerintah, masyarakat, hingga unit terkecil yaitu keluarga dan orang tua. Lebih jauh lagi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai sebuah sistem pelayanan sosial yang terstruktur dan terintegrasi. Sistem ini sengaja dirancang untuk membantu individu, termasuk anak-anak, agar mampu mencapai kualitas hidup yang baik serta menjalin hubungan sosial yang harmonis, sehingga proses pengembangan potensi diri mereka dapat berjalan dengan maksimal.

Identitas diri merupakan hak mendasar yang harus dimiliki oleh setiap individu, tidak terkecuali anak-anak. Dalam konteks di Indonesia, pemerintah

berupaya memenuhi hak tersebut melalui kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu sebuah dokumen resmi bagi warga negara berusia di bawah 17 tahun yang berfungsi sebagai bukti pengakuan hukum atas keberadaan mereka. Secara legalitas, penerbitan kartu ini berpijak pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 yang mewajibkan kepemilikannya bagi setiap anak. Keberadaan KIA tidak sekadar menjadi formalitas administratif belaka, melainkan memiliki kontribusi penting dalam aspek hukum, sosial, dan ekonomi bagi anak beserta keluarganya karena menjamin mereka terdata resmi dalam sistem kependudukan negara. Di sisi lain, absennya identitas hukum yang jelas dapat memicu berbagai kendala bagi anak, terutama dalam mengakses berbagai layanan publik yang krusial seperti sektor pendidikan, kesehatan, serta jaminan perlindungan sosial yang pada umumnya memerlukan dokumen identitas resmi sebagai syarat utama.

Tanpa adanya KIA, anak-anak dapat terhambat hak-haknya dan bahkan terancam menjadi "tidak terlihat" dalam sistem pemerintah. Hal ini dapat memperparah masalah sosial seperti kemiskinan, eksploitasi, dan perdagangan anak. KIA juga berfungsi sebagai alat perlindungan hukum bagi anak. Dengan identitas resmi, anak-anak lebih mudah dilacak dan dilindungi oleh negara terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam atau konflik. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) memegang peranan krusial dalam mencegah berbagai tindakan ilegal, seperti perdagangan anak dan pernikahan di bawah umur, karena proses verifikasi identitas dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sebaliknya, ketiadaan KIA berpotensi meningkatkan kerentanan anak terhadap

pelanggaran hak asasi manusia akibat tidak adanya bukti hukum yang sah atas eksistensi mereka. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan setiap anak memiliki KIA sebagai langkah nyata dalam melindungi serta memenuhi hak-hak dasar anak.

Kesejahteraan sosial bagi anak bukan hanya soal memberikan makanan bergizi atau fasilitas yang mewah, melainkan tentang bagaimana negara memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi secara adil. Hak dasar ini mencakup akses pendidikan yang layak, jaminan kesehatan, serta perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan. Agar anak-anak bisa menikmati semua hak tersebut, mereka membutuhkan bukti nyata berupa identitas resmi yang diakui oleh negara. Di sinilah Kartu Identitas Anak (KIA) memegang peranan yang sangat penting. KIA berfungsi sebagai pintu pembuka utama bagi anak untuk mendapatkan berbagai program bantuan, fasilitas publik, dan layanan sosial pemerintah. Tanpa adanya kartu identitas ini, seorang anak bisa menjadi tidak terlihat dalam sistem pemerintahan nasional, sehingga mereka terancam kehilangan kesempatan emas untuk berkembang dengan baik, aman, dan sejahtera.

Namun, dokumen yang bermanfaat tidak akan membawa dampak nyata jika cara pembagiannya menyulitkan masyarakat luas. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan program pelayanan publik menjadi kunci paling utama. Ketika pemerintah daerah mampu menjalankan program pembuatan KIA secara cepat, mudah, dan tepat sasaran seperti melalui sistem otomatis untuk bayi baru lahir maka hambatan jarak geografis dan biaya transportasi bisa langsung

teratasi dengan baik. Pelaksanaan pelayanan yang efektif memastikan bahwa tidak ada lagi orang tua di pelosok desa yang kesulitan mendapatkan hak anak mereka hanya karena urusan birokrasi yang rumit. Hubungan erat ketiganya menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial bagi anak baru bisa benar-benar terwujud apabila didukung oleh kepemilikan KIA yang merata, di mana pemerataan tersebut sangat bergantung pada seberapa efektif dan tanggapnya pemerintah dalam menjalankan pelayanan di lapangan. Ketika semua pelayanan administrasi berjalan dengan sukses, maka seluruh hak anak akan terpenuhi dan masa depan mereka menjadi lebih terjamin.

Dalam kacamata Ilmu Pemerintahan, pemenuhan hak identitas ini bukan sekadar urusan pencatatan administrasi biasa, melainkan sebuah kewajiban pelayanan dasar yang mutlak dipenuhi oleh negara. Pemerintah daerah dituntut untuk selalu hadir dalam memberikan pelayanan publik yang efisien, merata, dan responsif demi memberikan jaminan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Ketika birokrasi pemerintahan justru menyulitkan warga, maka fungsi pemerintahan tersebut dinilai belum berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu, kewajiban pemerintah daerah adalah menciptakan inovasi tata kelola yang tanggap untuk memastikan setiap anak di Kabupaten Tuban mendapatkan hak sipilnya dengan mudah.

Di dalam penelitian sebelumnya oleh (Arista & Suderana, 2019:56-66) melakukan penelitian dengan fokus yang mirip, namun mereka menemukan jenis kendala yang berbeda. Alasan mereka menjalankan penelitian ini adalah karena prihatin melihat masyarakat yang masih belum sadar dan belum paham

mengenai fungsi serta manfaat nyata dari kepemilikan KIA. Ditambah lagi, pihak pemerintah daerah setempat dinilai masih sangat minim dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan langsung kepada warga. Peneliti ingin mengkaji mengapa program nasional yang tujuannya bagus ini justru kurang direspons dengan baik oleh publik. Kekurangan terbesar yang berhasil diungkap dalam penelitian ini justru lebih banyak mengarah pada urusan teknis operasional di lapangan. Uniknya, para peneliti menemukan bahwa secara prosedur aturan, alur pembuatan kartu sebenarnya sudah dibuat dengan baik dan sangat sederhana. Sayangnya, pelaksanaan itu hancur di urusan teknis, seperti masalah jaringan komputer yang sering error atau lemot, serta pasokan aliran listrik yang tidak stabil alias sering mati di tempat pelayanan. Kendala-kendala teknis seperti inilah yang otomatis membuat proses penerbitan KIA jadi terhambat lama. Akibatnya, pemanfaatan kartu KIA menjadi tidak maksimal karena di satu sisi sistemnya sering bermasalah, dan di sisi lain masyarakatnya pun masih banyak yang belum menyadari pentingnya kartu tersebut.

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Ratna & Pasaribu, 2018:158-162) penelitian ini melihat kenyataan di lapangan bahwa tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam membuat KIA masih sangat rendah. Pada saat itu, banyak orang tua yang belum tergerak atau tidak tahu bahwa anak-anak mereka yang berusia di bawah 17 tahun sebenarnya wajib memiliki kartu identitas resmi sendiri. Selain itu, peneliti juga ingin melihat apa saja faktor penghambat, baik dari dalam instansi pemerintah maupun dari lingkungan luar, yang membuat program ini berjalan lambat. Namun, dari hasil penelitian tersebut ditemukan

beberapa kekurangan dan hambatan yang cukup serius. Dari sisi internal pemerintah, sarana dan prasarana yang mendukung pembuatan kartu ternyata masih sangat terbatas. Tidak hanya kekurangan alat, jumlah petugas atau tenaga kerja yang melayani urusan ini juga tidak memadai. Sementara dari sisi eksternal, kekurangan utamanya terletak pada metode sosialisasi pemerintah yang kurang efektif. Karena sosialisasinya lemas, informasi penting mengenai manfaat KIA tidak sampai ke telinga masyarakat luas, yang akhirnya membuat warga jadi tidak acuh untuk berpartisipasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi sosialisasi intensif melalui berbagai media dan inovasi pelayanan seperti layanan 30 menit, mobiling, online, dan tri in one.

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh (Amanah & Reviandani, 2023:68-77). Alasan mereka melakukan penelitian ini didasari oleh masalah klasik di tingkat kelurahan, yaitu masih rendahnya jumlah anak-anak yang memiliki dokumen KIA. Namun yang membedakan, pada era ini pemerintah sudah mulai menggunakan teknologi digital dengan meluncurkan aplikasi khusus bernama Klampid New Generation (KNG). Peneliti ingin melihat sejauh mana pemanfaatan aplikasi ini dalam membantu dan memudahkan masyarakat agar bisa mengajukan pembuatan KIA secara mandiri lewat internet tanpa harus repot mengantre. Sayangnya teknologi baru tidak selalu langsung membawa kemudahan tanpa celah. Kekurangan utama yang ditemukan oleh peneliti adalah aplikasi KNG tersebut ternyata masih dalam tahap penyesuaian sistem dan belum benar-benar siap dipakai secara matang. Alih-alih mempermudah

warga untuk mengakses layanan secara mandiri dari rumah, akses mandiri untuk masyarakat melalui website aplikasi tersebut justru akhirnya terpaksa harus ditutup sementara waktu karena kendala teknis. Ketidaksiapan sistem digital inilah yang menjadi titik lemah utama, karena aplikasi yang awalnya diharapkan bisa memangkas birokrasi justru belum bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi warga di kelurahan tersebut.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti memilih Kabupaten Tuban di Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian karena daerah ini memiliki karakteristik dan rekam jejak yang unik dalam menerapkan program Kartu Identitas Anak (KIA). Perjalanan kebijakan ini di Kabupaten Tuban sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2016, di mana pemerintah daerah menetapkan target sasaran yang cukup besar, yaitu menjangkau 298.856 anak atau sekitar 23% dari total keseluruhan populasi daerah. Demi kelancaran pelaksanaannya, proses pembagian kartu direncanakan berjalan dalam dua tahapan usia. Tahap pertama ditujukan bagi anak usia 0 hingga 5 tahun yang kepengurusannya disatukan secara langsung dengan pembuatan akta kelahiran. Sementara itu, tahap kedua diperuntukkan bagi kelompok anak usia 5 hingga 17 tahun, yang mewajibkan orang tua untuk memenuhi beberapa persyaratan dokumen tambahan (Sudarsono, 2016).

Keberhasilan Kabupaten Tuban dalam mengoptimalkan kepemilikan akta kelahiran hingga mencapai angka di atas 85% membuatnya dipercaya oleh pemerintah pusat sebagai salah satu dari 150 kabupaten atau kota percontohan di Indonesia. Kebijakan ini kemudian resmi diluncurkan secara luas pada tahun

2018, sebanyak 7.007 kartu KIA yang sudah berhasil diterbitkan sejak bulan Desember 2017 (Heri S, 2018). Pada masa awal peluncurannya, respons dan antusiasme dari masyarakat Tuban sebenarnya tergolong cukup baik dan positif, meskipun pada saat itu kepemilikan KIA belum dijadikan sebagai syarat wajib untuk keperluan pendaftaran sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya selama beberapa tahun, program ini justru mengalami hambatan penyerapan yang cukup besar. Memasuki tahun 2019, jumlah anak yang mengantongi KIA memang meningkat menjadi 37.900 anak, tetapi angka pencapaian tersebut nyatanya masih sangat jauh dari target awal yang diharapkan. Jika dianalisis, angka tersebut baru memenuhi 12,6% dari total 301.193 anak yang ada di Kabupaten Tuban, atau hanya berkisar 14,9% dari target awal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kenyataan bahwa ada sebanyak 263.293 anak atau sekitar 87,4% yang belum memiliki identitas resmi menjadi bukti nyata bahwa tingkat kesadaran warga masih rendah dan pelayanan belum menyentuh semua lapisan masyarakat (Nidya Marfis H., 2019). Kondisi memprihatinkan ini ternyata terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana sebagian besar anak di Kabupaten Tuban tercatat masih belum memiliki kartu identitas tersebut.

Ada beberapa faktor utama yang melatarbelakangi rendahnya angka kepemilikan kartu identitas anak di Kabupaten Tuban. Faktor pertama adalah masalah pemahaman publik, di mana masih banyak masyarakat yang belum mengerti sepenuhnya mengenai keuntungan dan manfaat nyata dari kepemilikan KIA. Masalah ini diperparah oleh adanya kesimpangan informasi atau

misinformation yang sempat beredar di tengah masyarakat pada tahun 2018 lalu. Faktor kedua terletak pada hambatan prosedur, di mana penerapan sistem pembagian yang dibagi menjadi dua tahap beserta rumitnya berkas administrasi yang diminta seperti sinkronisasi Kartu Keluarga dan KTP orang tua sering kali berubah menjadi beban tersendiri bagi keluarga yang sejak awal memang menghadapi kendala pada kevalidan dokumen kependudukan pribadi mereka.

Dalam merespons fenomena tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban meluncurkan program Bahtera Kita sebagai langkah nyata dengan berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya yang ditargetkan bagi kelompok usia bayi baru lahir. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan agar setiap anak yang baru lahir bisa langsung mendapatkan dokumen kependudukan yang lengkap sejak dini, meliputi akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA). Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk kepedulian dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sekaligus untuk meningkatkan akurasi data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah. Secara operasional, proses pengurusan rangkaian dokumen kependudukan ini telah terintegrasi secara otomatis bagi bayi yang lahir di fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Mekanismenya dimulai dari pembuatan akta kelahiran sebagai basis administrasi dasar, yang kemudian diikuti dengan pembaruan data pada KK keluarga yang bersangkutan. Pada saat yang sama, KIA juga langsung diproses untuk memberikan legalitas identitas yang sah bagi anak. Dokumen KIA ini memiliki peran yang sangat krusial dalam mempermudah akses anak

terhadap berbagai layanan publik di masa depan, seperti proses pendaftaran sekolah, jaminan pelayanan kesehatan, serta berbagai program kesejahteraan dari pemerintah yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan anak.

Program Bahtera Kita merupakan salah satu langkah strategis yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Melalui kolaborasi bersama 39 puskesmas dan 6 rumah sakit, penerapan sistem otomatisasi ini memberikan efisiensi yang nyata bagi para orang tua karena proses pengurusan dokumen kini dapat dilakukan secara terpadu tanpa harus menyita banyak waktu dan tenaga. Selain mempermudah masyarakat, program ini juga hadir sebagai solusi konkret dalam mengatasi tantangan terkait rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang selama ini dihadapi oleh berbagai wilayah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban berharap inovasi tersebut mampu memberikan kontribusi positif yang luas, khususnya dalam meningkatkan kelancaran pengurusan dokumen. Lebih lanjut, melalui kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), anak-anak di Kabupaten Tuban diproyeksikan akan lebih mudah mendapatkan akses terhadap berbagai program pemerintah serta layanan publik yang mendukung tumbuh kembang mereka. Secara keseluruhan, implementasi program ini merefleksikan komitmen nyata dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan layanan program Bahtera Kita di Kabupaten Tuban?
2. Apa saja faktor yang mendukung efektifitas program Bahtera Kita di Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas program Bahtera Kita serta pengaruhnya terhadap kemudahan akses layanan publik bagi masyarakat di Kabupaten Tuban.
2. Mengidentifikasi faktor yang mendukung tingkat efektivitas pelaksanaan program Bahtera Kita di Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dan mendukung temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang efektivitas program Kartu Identitas Anak (KIA). Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan jawaban yang jelas mengenai kegunaan KIA, khususnya dalam membandingkan kondisi sebelum dan sesudah diterapkannya layanan program Bahtera Kita oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi atau rujukan yang bermanfaat bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa digunakan sebagai sarana edukasi untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai urgensi selama pengurusan KIA melalui program Bahtera Kita serta apa saja dampak atau konsekuensi yang dihadapi jika seorang anak belum memiliki kartu identitas tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Pengertian Teori Efektivitas

Dalam kajian ilmu Administrasi Negara, istilah efektivitas merupakan konsep yang sudah sangat akrab dan sering dibahas. Kata ini berakar dari bahasa Inggris yaitu *effective*, yang mengandung arti keberhasilan dalam mencapai hasil yang bagus atau menyelesaikan sesuatu secara tepat. Jika merujuk pada kamus ilmiah populer, efektivitas digambarkan sebagai ketepatan dalam penggunaan sesuatu demi mendukung tercapainya suatu tujuan. Para ahli umumnya memandang efektivitas sebagai ukuran sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan harapan. Mengenai hal ini, Agung Kurniawan melalui bukunya yang berjudul *Transformasi Pelayanan Publik* memberikan penjelasan spesifik bahwa efektivitas adalah kemampuan sebuah organisasi untuk menjalankan tugas, fungsi, maupun program kerjanya dengan baik, tanpa mengalami tekanan atau

hambatan yang mengganggu dalam proses pelaksanaannya. (Rosalina, 2012).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas dapat diartikan sebagai cara, aktivitas, dan keberhasilan dalam meraih hasil yang diharapkan saat menyelesaikan suatu pekerjaan. Istilah efektivitas ini sendiri berasal dari kata *efektif* yang bermakna ketercapaian target atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari sudut pandang Susanto (2005:156) efektivitas merupakan kemampuan suatu pesan untuk memberikan pengaruh, yang sekaligus menunjukkan sejauh mana tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik. Dalam konteks yang lebih luas, efektivitas menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa jauh target yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau organisasi berhasil direalisasikan. Mengingat setiap organisasi selalu berorientasi pada pencapaian tujuan dalam setiap programnya, maka keberhasilan lembaga tersebut sangat bergantung pada tingkat efektivitas kegiatan yang dijalankan yang mana pelaksanaan kegiatan ini juga didukung oleh berbagai faktor penting di dalamnya.

Sondang P. Siagian (2001:24) menjelaskan bahwa efektivitas melibatkan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar diatur sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa dalam kegiatan yang dijalankan.

Kurniawan (2005:109), efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lancar tanpa adanya tekanan atau hambatan. Pandangan ini menunjukkan bahwa efektivitas merupakan tolak ukur keberhasilan dalam meraih target yang telah ditetapkan, yang dinilai dengan membandingkan antara rencana awal dan hasil nyata yang dicapai. Di sisi lain, Susanto memberikan sudut pandang yang berbeda dengan melihat efektivitas sebagai kemampuan atau daya suatu pesan dalam memengaruhi pihak lain. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, efektivitas pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah alat ukur untuk melihat sejauh mana tujuan yang telah direncanakan secara matang berhasil diwujudkan. Dalam hal ini, efektivitas menjadi cerminan tingkat kesuksesan suatu organisasi apabila organisasi tersebut mampu mencapai targetnya dengan baik, maka kinerjanya dapat dikatakan sudah berjalan secara efektif.

Menurut Adibowo dkk (2014) dalam Mahmudi (2005:92) dalam (Andriani, 2021:18) mendefinisikan efektifitas “Efektivitas merujuk pada pelaksanaan sejumlah tugas yang telah ditentukan dalam suatu rencana, dilakukan sesuai dengan petunjuk dan prosedur yang ada, sehingga sasaran yang diinginkan bisa tercapai.”

Berdasarkan beberapa pandangan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan serangkaian metode yang digunakan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai keberhasilan sesuai

dengan aturan yang berlaku. Secara umum, tingkat efektivitas ini diukur berdasarkan kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu dalam merealisasikan target yang telah direncanakan. Hal ini menandakan bahwa sebuah aktivitas akan dinilai semakin efektif jika semakin banyak rencana awal yang berhasil diwujudkan. Oleh karena itu, efektivitas pada dasarnya mencerminkan tingkat keberhasilan suatu pencapaian di mana semakin tinggi jumlah rencana yang terealisasi maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas dari kegiatan tersebut.

1.5.2 Kriteria Efektivitas

Menilai tingkat efektivitas suatu program sering kali menjadi tantangan tersendiri karena dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Jika dilihat dari aspek produktivitas, efektivitas erat kaitannya dengan penyediaan barang atau jasa, yang dapat dianalisis dengan membandingkan antara rencana awal dan hasil nyata yang dicapai di lapangan. Sebaliknya, apabila langkah yang diambil tidak tepat, tujuan tidak akan terwujud dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan, sehingga program tersebut tidak dapat dikatakan efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, S. P. Siagian (1982:30:33) dalam Suryani (2016) menjelaskan bahwa efektivitas dapat diukur melalui beberapa parameter berikut :

1. Ketegasan tentang apa yang ingin dicapai sangat penting agar karyawan dapat meraih sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas mereka.
2. Kejelasan dalam strategi pencapaian tujuan adalah metode yang digunakan untuk mencapai sebuah sasaran.
3. Analisis dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan target serta strategi yang akan dijalankan menunjukkan bahwa sebuah kebijakan harus mampu berfungsi sebagai penghubung. Artinya kebijakan tersebut harus bisa menyelaraskan antara tujuan besar yang ingin dicapai dengan kegiatan operasional sehari-hari di lapangan.
4. Pada dasarnya perencanaan yang matang berfungsi untuk menetapkan langkah-langkah konkret yang perlu diambil saat ini demi mencapai tujuan di masa depan.
5. Penyusunan program yang tepat merupakan hal yang sangat krusial. Apabila tahap pelaksanaan di lapangan tidak memiliki panduan yang jelas, hal tersebut biasanya terjadi karena rencana awal belum dijabarkan secara detail ke dalam program kerja yang dijalankan.
6. Kemampuan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal guna mencapai hasil kerja yang efektif dan efisien.
7. Pencapaian target suatu organisasi sangat bergantung pada proses pelaksanaan yang efektif dan efisien. Tanpa adanya implementasi yang optimal, organisasi tersebut akan kesulitan dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik sangat diperlukan untuk mengantisipasi kekurangan atau ketidaksempurnaan manusia, sekaligus menjadi kunci utama dalam mewujudkan efektivitas kerja.

Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh S.P. Siagian dalam buku *Manajemen Modern* (1982:30-33) sebagaimana dikutip oleh Suryani (2016), penilaian terhadap efektif atau tidaknya suatu pekerjaan harus didasarkan pada delapan indikator utama. Untuk mengukur tingkat efektivitas tersebut, terdapat beberapa kriteria umum yang dapat dijadikan sebagai acuan yakni sebagai berikut :

- a. Efektivitas Keseluruhan
- b. Produktivitas
- c. Efisiensi
- d. Laba
- e. Pertumbuhan
- f. Stabilitas
- g. Semangat Kerja
- h. Kepuasan Kerja
- i. Penerimaan Tujuan Organisasi
- j. Integrasi
- k. Fleksibilitas Adaptasi
- l. Penilaian Pihak Eksternal

Menurut kriteria yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa menilai sebuah efektivitas dapat dilihat dari tingkat kepuasan kerja, motivasi kerja, serta evaluasi yang dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu.

1.5.3 Tingkatan Efektivitas

Menilai kesesuaian suatu program merupakan salah satu cara untuk melihat seberapa efektif program tersebut dalam mencapai keberhasilan yang diinginkan. Melalui evaluasi ini, kita bisa mengetahui sejauh mana program mampu memberikan hasil yang sesuai rencana. Berkaitan dengan hal tersebut tingkatan efektivitas menurut David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich, dan Donnely (1997: 25-26) dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkat, yaitu:

1. Efektivitas Individu

Efisiensi individu diartikan sebagai evaluasi terhadap tingkat efektivitas yang dilakukan secara mandiri untuk mengukur capaian kerja dari masing-masing karyawan atau anggota, di mana hasil penilaian tersebut pada akhirnya akan memengaruhi keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

2. Efektivitas Kelompok

Efektivitas kelompok diartikan sebagai keberhasilan kerja sama yang terjalin antarindividu dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kinerja suatu kelompok sangat bergantung pada peran aktif masing-masing anggotanya, di mana

setiap sumbangan pemikiran maupun tenaga yang diberikan memiliki nilai penting bagi pencapaian hasil yang optimal.

3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi diartikan sebagai keterlibatan aktif dari setiap individu dan kelompok yang ada di dalamnya. Melalui kerja sama yang saling mendukung dan berjalan beriringan, organisasi akan mampu mencapai target atau hasil kerja yang jauh lebih maksimal dibandingkan jika masing-masing bagian bekerja secara terpisah.

1.5.4 Indikator Efektivitas

Menurut pandangan John P. Campbell, ada beberapa hal yang bisa dijadikan tolak ukur untuk melihat seberapa efektif atau baiknya hasil kerja yang telah dicapai :

1. Keberhasilan Program

Keberhasilan suatu program dapat dinilai dari sejauh mana pelaksanaan kegiatan di lapangan sudah sesuai dengan tujuan awal yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat.

2. Keberhasilan Sasaran.

Dalam konteks ini, efektivitas dinilai dari sejauh mana program mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, dengan fokus utama pada hasil nyata (output) yang diperoleh.

3. Kepuasan Terhadap Program

Tingkat kepuasan konsumen atau pengguna dapat menjadi penilaian penting untuk menilai seberapa efektif suatu program dijalankan. Ketika pengguna merasa puas, hal ini menunjukkan bahwa program tersebut telah berhasil menjawab dan memenuhi apa yang mereka butuhkan.

4. Tingkat Input dan Output

Dalam konteks ini, tingkat efektivitas sangat ditentukan oleh perbandingan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Suatu proses dapat dikatakan efisien apabila hasil atau output yang diperoleh lebih besar daripada sumber daya atau input yang dikeluarkan. Sebaliknya, jika nilai input justru lebih besar daripada output yang dicapai maka proses tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak efisien.

5. Pencapaian Tujuan Secara Menyeluruh.

Hal ini dapat dinilai dari bagaimana organisasi mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik demi mewujudkan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pada dasarnya, efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu program atau tindakan mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kajian yang lebih luas, efektivitas tidak hanya berfokus pada hasil akhir yang diperoleh, melainkan juga mencakup evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan dalam mencapai hasil tersebut. Oleh karena itu, suatu kegiatan dapat dinilai efektif apabila

mampu memberikan dampak atau perubahan yang diharapkan secara optimal. Meskipun istilah ini sering disamakan dengan efisiensi, keduanya memiliki orientasi yang berbeda. Efisiensi lebih menekankan pada aspek penghematan dan optimalisasi penggunaan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga. Sebaliknya, efektivitas lebih menitikberatkan pada keberhasilan dalam mewujudkan tujuan utama secara menyeluruh.

Dalam bidang bisnis, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana suatu perusahaan mampu mencapai tujuan strategisnya, misalnya meningkatkan penjualan memperluas jangkauan pasar, atau meningkatkan kepuasan konsumen. Di sisi lain dalam sektor organisasi non-profit atau pemerintah efektivitas dapat dinilai dari seberapa baik program atau kebijakan yang diimplementasikan memberikan manfaat bagi masyarakat sejalan dengan visi dan misi yang ada. Di tingkat individu, efektivitas bisa terlihat dari kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas dengan hasil yang memuaskan baik pada lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas meliputi perencanaan yang baik, koordinasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Tanpa adanya pendukung ini, usaha untuk mencapai tujuan dapat menjadi kurang efektif, meskipun telah dilakukan dengan niat dan kerja keras yang tinggi.

Dalam mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Program Bahtera Kita dalam memenuhi kepemilikan KIA bagi setiap anak, penelitian ini menggunakan dimensi indikator efektivitas dari teori John P. Campbell yang telah disesuaikan menjadi variabel konkret di lapangan. Indikator tersebut secara terperinci mencakup keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, serta perbandingan tingkat input dan output. Penerapan dimensi-dimensi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, melainkan juga menjadi dasar utama dalam menentukan siapa saja individu yang paling tepat untuk dijadikan sebagai responden penelitian. Karena indikator efektivitas ini mengukur pengalaman nyata terkait kemudahan prosedur dan kecepatan layanan, maka subjek terpilih haruslah mereka yang bersentuhan langsung dengan alur pelayanan tersebut.

Oleh karena itu, penentuan kriteria responden dalam penelitian ini ditarik secara linier dari kebutuhan data pada indikator keberhasilan sasaran dan kepuasan publik. Berdasarkan indikator tersebut, yang masuk dan memenuhi syarat sebagai responden adalah masyarakat Kabupaten Tuban yang sedang atau pernah mengurus dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) secara langsung melalui layanan program Bahtera Kita di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit daerah. Karakteristik responden ini sebagian besar didominasi oleh kelompok orang tua, khususnya kaum ibu yang melahirkan, karena merekalah yang secara fisik merasakan langsung

bagaimana proses penggabungan berkas administrasi berjalan. Pengalaman nyata mereka dalam menghemat biaya transportasi serta merasakan ringkasnya dokumen merupakan data utama yang dicari.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah tahapan krusial dalam penelitian yang berfungsi untuk menjabarkan konsep abstrak menjadi indikator-indikator yang lebih spesifik dan dapat diukur. Melalui proses ini, peneliti akan lebih mudah dalam melakukan analisis data nantinya. Adapun baik atau tidaknya kualitas dari susunan operasional ini sangat bergantung pada seberapa tepat dan akurat dimensi yang dipilih dalam menggambarkan konsep utama penelitian tersebut.

Tabel 1.1 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Definisi Konsep	Dimensi	Indikator
Efektifitas Pelaksanaan Program Bahtera Kita	Tingkat keberhasilan Program Bahtera Kita oleh Disdukcapil Kabupaten Tuban dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terutama dalam hal peningkatan	a. Keberhasilan Program	a. Keselarasan Kegiatan Tingkat kesesuaian antara pelaksanaan Program Bahtera Kita (proses otomatisasi

	kepemilikan KIA dan dampaknya terhadap layanan publik.		dokumen akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan KIA)
		b. Keberhasilan Sasaran	a. Pencapaian Target Perbandingan antara jumlah anak yang memiliki KIA (output) dengan target kepemilikan yang telah ditetapkan (persentase peningkatan kepemilikan KIA di Tuban).

		c. Kepuasan Terhadap Program	a. Tingkat Kepuasan Sejauh mana orang tua/masyarakat merasa puas terhadap layanan Program Bahtera Kita, terutama dalam kemudahan dan kecepatan proses pengurusan dokumen KIA.
		d. Tingkat Input dan Output	a. Rasio Efisiensi Perbandingan antara sumber daya yang digunakan (input: waktu, tenaga, biaya, kerja sama

			puskesmas/rumah sakit) dengan hasil yang dicapai (output: penerbitan dokumen KIA).
--	--	--	--

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang terstruktur mengenai elemen-elemen dan peristiwa serta hubungan sebab akibat di antara mereka. Penelitian kuantitatif dijelaskan sebagai suatu penyelidikan terencana terhadap fenomena dengan cara mengumpulkan data yang bisa dihitung melalui penggunaan metode statistik, matematika, atau pengolahan data. Metode penelitian kuantitatif pada dasarnya berlandaskan pada filsafat positivisme, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2009:14). Metode ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, di mana pengambilan sampelnya biasanya dilakukan secara acak. Dalam penerapannya, pengumpulan data dilakukan dengan bantuan instrumen penelitian, yang kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji

hipotesis yang telah dibuat. Sejalan dengan hal tersebut, Emzir (2009:28) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif menggunakan paradigma post-positivist untuk mengembangkan pengetahuan. Proses ini melibatkan pemahaman hubungan sebab-akibat, perbedaan variabel, pengujian teori, serta pemanfaatan survei atau eksperimen yang membutuhkan data statistik. Dengan menerapkan metode penelitian ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang akurat untuk menghitung persentase kepedulian warga Kabupaten Tuban terhadap Kartu Identitas Anak (KIA). Selain itu, pendekatan ini juga sangat tepat digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas program Bahtera Kita yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban di lingkungan masyarakat.

1.7.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan objek yang menjadi fokus utama pengamatan. Objek tersebut bisa sangat bervariasi, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, benda, hingga fenomena atau peristiwa tertentu yang membawa karakteristik khusus sebagai sumber data. Oleh karena itu, peneliti wajib menentukan batasan populasi secara jelas dan terperinci, termasuk estimasi jumlah anggota serta wilayah cakupan penelitiannya. Langkah ini sangat krusial agar peneliti dapat mengambil sampel yang benar-benar mewakili (representatif) sekaligus membatasi ruang lingkup

kesimpulan akhir yang akan diambil. Namun, jika jumlah anggota populasi yang diteliti cenderung sedikit, peneliti dapat melibatkan seluruh anggota tersebut ke dalam penelitian. Pendekatan seperti ini dikenal dengan istilah sampel total atau sensus. Di sisi lain, pemahaman tentang populasi tidak selalu merujuk pada kelompok dalam skala besar. Satu orang individu pun sebenarnya bisa dikategorikan sebagai populasi karena memiliki berbagai dimensi karakter yang unik untuk diteliti, contohnya seperti gaya bicara, tingkat kedisiplinan, hobi, pola interaksi sosial, hingga cara memimpin (Agustina, 2019:9).

Menurut Syahrudin and Salim, 2012 dalam (Agustina, 2019:44), populasi dibagi menjadi dua jenis yaitu Populasi Infinitif dan populasi finitif

a. Populasi Infinitif

Populasi Infinitif adalah sebuah populasi di mana jumlah anggotanya tidak bisa ditentukan dengan tepat, atau yang jumlahnya mengalami perkembangan yang berlangsung tanpa henti.

b. Populasi Finitif

Populasi Finitif adalah populasi yang jumlahnya dapat dipastikan, dapat diukur, atau objek penelitian yang berada di area tertentu yang dapat membedakan antara satu kelompok populasi dengan kelompok populasi lainnya.

Populasi dalam penelitian ini merujuk pada seluruh objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu untuk dipelajari secara mendalam. Dalam kaitannya dengan evaluasi efektivitas pelaksanaan Program Bahtera Kita di Kabupaten Tuban, jenis populasi yang dipilih oleh peneliti adalah populasi finitif. Populasi finitif sendiri merupakan sebuah kelompok objek penelitian yang jumlah total anggotanya sudah jelas, pasti, dan dapat diukur secara nyata dalam batasan wilayah serta waktu tertentu.

Secara rinci, berdasarkan data administrasi tersebut, diketahui populasi anak umur 0-4 tahun sekitar 234.770 dan anak umur 5-17 tahun sekitar 45.442 dengan jumlah keseluruhan anak 0-17 tahun sekitar 280.212. Keberadaan angka total yang pasti dan dapat dihitung inilah yang menjadi alasan bagi peneliti untuk menerapkan jenis populasi finitif, guna mempermudah penentuan ukuran sampel secara akurat. Hal ini penting agar hasil akhir kuesioner dari penelitian dapat mewakili seluruh karakteristik anak di daerah Tuban secara ilmiah serta mampu memberikan gambaran data yang valid, objektif, tepat, transparan, terpercaya, dan juga dapat dipertanggungjawabkan nanti.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian atau segmen yang diambil dari keseluruhan populasi (Suharyadi & Purwanto S. K., 2016). Dalam menentukan sampel ini peneliti perlu mempertimbangkan beberapa

faktor krusial seperti masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai, hipotesis yang dirumuskan, serta metode dan instrumen yang digunakan. Penggunaan sampel yang representatif sangat penting agar hasil atau temuan dalam studi tersebut dapat diandalkan dan diterapkan kembali pada seluruh populasi. Adapun kriteria sampel yang baik dinilai dari tingkat bias dan tingkat ketelitiannya yang diukur melalui *standard error* estimasi dan standar deviasi, semakin kecil nilai kesalahan standar estimasi tersebut maka tingkat ketelitian penelitian akan dinilai semakin tinggi. Secara umum, sampel dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama yaitu sampel probabilitas dan sampel nonprobabilitas Suharyadi dan Purwanto S.K., 2016 dalam (Agustina, 2019:45-46).

a. Sampel Probabilitas

Sampel probabilitas adalah metode pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi bagian dari sampel penelitian.

b. Sampel Nonprobabilitas

Sampel nonprobabilitas adalah penentuan anggota sampel yang didasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu dari peneliti. Melalui teknik ini, setiap individu yang ada di dalam populasi tidak memiliki peluang atau kesempatan yang sama besar untuk terpilih sebagai sampel. Selanjutnya, untuk

menghitung dan menetapkan jumlah total sampel yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menerapkan rumus Slovin.

Rumus Slovin digunakan untuk menentukan jumlah sampel minimal dari suatu populasi yang total anggotanya sudah diketahui secara pasti. Tujuan dari penggunaan rumus ini adalah untuk memperoleh sampel yang mampu mewakili seluruh populasi, sehingga kesimpulan akhir penelitian dapat digeneralisasikan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain menjaga keakuratan data, rumus ini juga membantu peneliti untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya selama proses pengumpulan data di lapangan. Secara matematis, formula ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Kelonggaran ketidaktelitian (*margin of error*) yang ditetapkan oleh peneliti

Dalam rumus tersebut, simbol ***n*** menunjukkan jumlah sampel yang ingin dicari, sedangkan simbol ***N*** mewakili total

keseluruhan populasi yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, variabel e merupakan tingkat kesalahan atau batas toleransi (*margin of error*) yang ditentukan oleh peneliti, di mana nilai yang biasanya digunakan adalah sebesar 5% (0,05) atau 10% (0,1). Aturan dasar dalam penggunaan rumus ini adalah semakin kecil tingkat kesalahan yang ditoleransi, maka jumlah sampel yang dibutuhkan akan menjadi semakin besar. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dalam penelitian memiliki tingkat akurasi dan presisi yang lebih tinggi.

Dalam hal ini peneliti menentap jumlah sampel yang akan di teliti sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\
 n &= \frac{280.212}{1 + 280.212(15\%)^2} \\
 &= \frac{280.212}{1 + 6.305} \\
 &= \frac{280.212}{6.305} \\
 &= 44,44
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan ukuran sampel dengan menggunakan rumus Slovin, diperoleh angka sebesar 44,44. Oleh karena itu, peneliti menetapkan bahwa jumlah sampel

yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 44 orang.

Penetapan jumlah sampel sebanyak 44 responden dalam penelitian ini dinilai sudah sangat cukup dan mampu mewakili seluruh kelompok masyarakat di Kabupaten Tuban yang menjadi sasaran program Bahtera Kita. Meskipun angka ini terlihat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan total populasi anak yang ada di daerah tersebut, keputusan ini diambil karena karakteristik dari responden yang diteliti cenderung seragam atau homogen. Seluruh responden yang dipilih merupakan para orang tua yang memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan dan merasakan alur pelayanan Program Bahtera Kita di berbagai fasilitas kesehatan terdekat.

Pengalaman nyata yang mereka rasakan saat mengurus dokumen administrasi, seperti tingkat kemudahan prosedur, efisiensi waktu antrean, serta penghematan biaya transportasi, memiliki pola yang serupa satu sama lain di lapangan. Oleh karena itu, informasi yang dikumpulkan dari 44 sampel responden ini sudah bisa memberikan gambaran yang utuh, mendalam, serta objektif mengenai efektivitas pelaksanaan program secara keseluruhan. Dengan demikian hasil penelitian tetap memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dan sah untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan ilmiah tanpa kehilangan

fokus utamanya. Hal ini membuat proses pengolahan data menjadi lebih terarah dan efisien namun tetap mampu menjawab seluruh rumusan masalah penelitian secara tepat dan tepercaya.

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data tersebut berupa angka yang dikumpulkan dengan menggunakan alat penelitian, lalu dianalisis dengan metode statistik sebagai sarana untuk melakukan pengujian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden di lapangan melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner tersebut disusun secara terstruktur dan menyeluruh untuk mengumpulkan informasi serta penjelasan yang dibutuhkan dari berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Tuban.

b. Kuesioner

Penggunaan teknik penyebaran kuesioner mengumpulkan data melalui sejumlah pertanyaan yang ditulis dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari responden dalam pengumpulan data sebagai pelengkap. Jumlah keseluruhan kuesioner yang ditujukan kepada responden mencapai 44 orang yang merupakan Masyarakat Kabupaten Tuban.

1.7.4 Skala Pengukuran

Skala Likert yang saat ini banyak digunakan pada dasarnya dikembangkan oleh Rensis Likert dan dipublikasikan pada tahun 1932 melalui artikel ilmiahnya yang berjudul “*A Technique For Measurement Of Attitudes*” di Jurnal Archives Of Psychology. Landasan pembuatan skala ini berasal dari penelitian bersama Gardner Murphy yang sudah berjalan sejak tahun 1929 (Likert, 1932). Awalnya, Likert merancang instrumen ini untuk mengukur pandangan masyarakat terhadap lima isu penting pada masa itu, yaitu hubungan internasional, ras, ekonomi, politik, dan agama. Seiring berjalannya waktu Skala Likert menjadi sangat populer dan banyak diterapkan dalam berbagai penelitian survei serta bidang ilmu sosial (Johnson and Morgan, 2016; Heiberger and Holland, 2015; Lester, dkk, 2014; Neuman, 2011) dalam (Suasapha, 2020:31).

Kuesioner dengan Skala Likert pada umumnya memuat serangkaian pernyataan yang dilengkapi dengan opsi penilaian terstruktur. Pilihan tersebut berfungsi sebagai indikator sikap yang dapat dipilih langsung oleh responden sesuai dengan pandangan pribadi mereka. Sebagai skala psikometrik yang paling populer dalam metodologi penelitian, Skala Likert biasanya menggabungkan minimal empat butir pertanyaan untuk menghasilkan skor akumulatif. Nilai total inilah yang nantinya mencerminkan karakteristik individu seperti tingkat pengetahuan, sikap, ataupun perilaku yang sedang diteliti.

Adapun pengelompokan skala Likert berdasarkan tingkatannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Membantu
2. Tidak Membantu
3. Cukup
4. Membantu
5. Sangat Membantu

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan fakta dan informasi langsung dari lapangan demi mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini, metode yang diterapkan oleh peneliti adalah kuesioner. Kuesioner sendiri merupakan instrumen pengumpulan data berupa daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden, sehingga mereka dapat memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Peneliti memilih aplikasi ini karena memiliki kemampuan olah data statistik yang kuat serta mampu menyajikan hasil dalam bentuk grafik yang jelas dan komunikatif. Selain itu, SPSS juga memiliki tampilan menu dan kotak dialog yang sederhana, sehingga sangat ramah pengguna dan memudahkan peneliti

dalam mengoperasikannya. Pada awal perkembangannya, software ini memang dikhususkan untuk analisis data di bidang ilmu sosial, sesuai nama aslinya yaitu *Statistical Package for the Social Sciences*. Namun, seiring berjalannya waktu, kegunaan SPSS terus berkembang untuk mendukung berbagai bidang lain, mulai dari riset pemasaran, pengendalian mutu di industri, hingga penelitian sains. Oleh karena itu, sejalan dengan fungsinya yang kini semakin luas, singkatan SPSS telah disesuaikan menjadi *Statistical Product and Service Solutions*.

Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan teknik analisis data melalui program SPSS untuk mengukur tingkat keberhasilan Program Bahtera Kita yang diusung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk mengetahui seberapa penting dan mendesaknya kebutuhan anak-anak di daerah tersebut terhadap kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).